

ANALISIS ASAS NASIONALITAS SEBAGAI DASAR LEGALISASI PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH WNI DI LUAR NEGERI

Oleh:

TiniKarmilaSitepu¹ danNinikDarmini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang dilaksanakannya perkawinan beda agama antar WNI di luar negeri, serta kesesuaian ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap keabsahan perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri dengan menganalisis hubungan antara asas nasionalitas dengan asas *lex loci celebrationis* dalam pelaksanaan perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri. dan akibat hukum bagi anak akibat dilaksanakan perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni, penelitian kepustakaan dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang WNI beda agama melakukan perkawinan di luar negeri adalah faktor sosiologis, adanya kekosongan hukum yang menyebabkan penyeludupan hukum, dan di luar negeri tidak mengenal adanya perbedaan agama. Legalitas perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri adalah tidak sah, hal ini dikarenakan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan asas nasionalitas sehingga asas *lex loci celebrationis* digunakan sebagai pelengkap. Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan WNI beda agama di luar negeri secara tidak sah adalah anak tersebut menjadi anak di luar kawin, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat mempunyai hubungan dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

Kata kunci: Perkawinan, Beda Agama, Asas Nasionalitas

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jl. BungaRinteGg. Mawar Sharon I No. 5, sitepu.mila@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Departemen Hukum Perdata

ANALYSIS OF NATIONALITY PRINCIPLES AS THE BASIS OF LEGALIZATION OF INTERFAITH MARRIAGE BY INDONESIAN CITIZENS IN OVERSEAS

by:

Tini Karmila Sitepu¹ dan Ninik Darmini²

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the background of the implementation of inter-religious marriage among Indonesian citizens abroad, and the conformity of the provisions of Article 56 paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 on Marriage against the validity of marriage of different religions by citizens abroad by analyzing the relationship between the principle of nationality with the principle of *lex loci celebrationis* in the implementation of marriage of different religions by Indonesian citizens abroad. and legal consequences for children due to the intermarriage of different religions by Indonesian citizens abroad.

This research is descriptive. The type of research used in this research is empirical normative which is carried out in 2 (two) stages namely, library research and then field research. Data analysis was carried out qualitatively so as to produce descriptive analysis data.

The results of the study showed that the backgrounds of Indonesian citizens with different religions doing marriages abroad were sociological factors, there were legal vacancies that led to legal smuggling, and abroad did not recognize the existence of religious differences. Legality of interfaith marriages by Indonesian citizens abroad is illegal, this is because Article 56 paragraph (1) of the Marriage Law emphasizes the principle of nationality so that the principle of *lex loci celebrationis* is used as a complement. The legal consequences for children born to marriages of foreigners of different religions abroad illegally are that the child becomes a child out of wedlock, so that he only has a civil relationship to his mother and mother's family, but can also have a relationship with a man as his father if he can proven based on science and technology and / or other evidence.

Keywords: Marriage, Different Religion, Nationality Principle.

¹Colleger Master Of Law, Faculty of Law GadjahMada University Yogyakarta, Jl. BungaRinteGg. Mawar Sharon I No. 5, sitepu.mila@gmail.com

²Lecturer in Faculty of Law GadjahMada University, Civil Law Department